



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien,
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persen	24,34
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor Formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	12,35
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan	Persentase Fasilitas Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100
4	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Indeks Transmigrasi	Dokumen	5
5	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
6	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
7	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30 (Baik)
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah.	Level	3
10	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

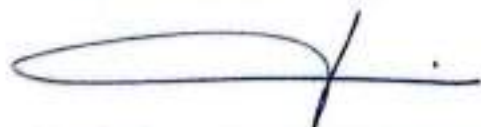
No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
13	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
16	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
17	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
18	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 12.605.992.012	APBD-P
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 148.167.500	APBD-P
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 3.943.833.400	APBD-P
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 7.194.047.540	APBD-P
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 8.848.883.950	APBD-P
6.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 131.386.100	APBD-P
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 350.151.560	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 33.222.462.062	

Kutai Kartanegara, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Prt. KEPALA DINAS



AKHMAD TAUFIK Hidayat, S.IP., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik”

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA


LUKMAN, S.Sos, M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persen	24,34
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Pesen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		tahun.		
12	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat kepatuhan Penyampaian SPT tahunan 100 % per 31 maret setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Input e - Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan di verifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
17	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	3.889.095.000	APBD-P
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.225.850	APBD-P
3.	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	15.350.150	APBD-P
4.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.162.400	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		3.943.833.400	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA


LUKMAN, S.Sos, M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HJ. SYARIFAH ROSITAH,ST,MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik*

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,



Ir. Hj. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT

Pembina - IV/a
NIP. 19721028 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor Formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	12,35
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Pesen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun.	Persen	100
12	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat kepatuhan Penyampaian SPT tahunan 100 % per 31 maret setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Input e - Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan di verifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
17	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	6.984.574.840	APBD-P
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	209.472.700	APBD-P
3.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	148.167.500	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		7.342.215.040	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,


Ir. Hj. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT
Pembina - IV/a
NIP. 19721028 200112 2 001

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	6.984.574.840	APBD-P
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	209.472.700	APBD-P
3.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	148.167.500	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		7.342.215.040	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

HJ. Ir. SYARIFAH ROSITAH, ST, MM
Pembina - IV/a
NIP. 19721028 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. Ir. SYARIFAH ROSITAH,ST,MT

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik"

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI


Ir. HJ. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT
Pembina - IV/a
NIP. 197210282001122001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Cakupan program transmigrasi yang dilaksanakan	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	18
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Pesen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	(SKP)	bulan Februari setiap tahun.		
12	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat kepatuhan Penyampaian SPT tahunan 100 % per 31 maret setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Input e - Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan di verifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	131.386.100	APBD-P
2.	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	350.151.560	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		481.537.660	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI



Ir. HJ. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT
Pembina - IV/a
NIP. 197210282001122001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SUHARNINGSIH, SH, M.M

Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik”
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam Satu Daerah	248.792.900	APBD-P
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	8.600.091.050	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		8.848.883.950	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hj. SUHARNINGSIH, SH, M.M
Pembina- IV/a
NIP. 19690108 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan	Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	88,30
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Pesen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun.	Persen	100
12	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat kepatuhan Penyampaian SPT tahunan 100 % per 31 maret setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Input e - Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan di verifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
14	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
17	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
18	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


AKHMAD TAUEIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL


Hj. SUHARNINGSIH, SH, M.M
Pembina- IV/a
NIP. 19690108 199403 2 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks

Pelayanan Publik;

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS

LUKMAN, S.Sos, M.Si

Pembina - IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	460.385.021	APBD-P
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.164.857.601	APBD-P
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.086.000	APBD-P
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.643.000	APBD-P
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.535.070	APBD-P
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.670.000	APBD-P
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	886.075.320	APBD-P
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	525.740.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		12.605.992.012	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19670420 199803 1 014

LUKMAN, S.Sos, M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks

Pelayanan Publik;

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
10. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan kemiskinan;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara

langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pihak kedua :

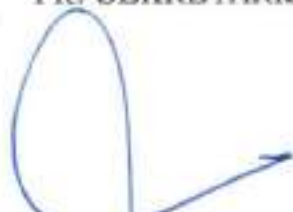
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,

Pt. SEKRETARIS



LUKMAN, S.Sos, M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 19720516 200801 1 016

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



MARIANI, S.Sos

Penata Tk. I - III/d

NIP. 19710724 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% Per tanggal 31 Maret setiap Tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per Tanggal 31 Maret Setiap Tahun	Persen	100
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100
8	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
9	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
10	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan BMD	Dokumen	1
11	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	8
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1
13	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	4
14	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Pesentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	JP	20
16	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3Dn per Tanggal 25 setiap Tahun	Persen	40
17	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi kepegawaian	Dokumen	1
18	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Dokumen	1
19	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah aparatur yang di monitoring, evaluasi dan penilaian	Dokumen	1

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		kinerja pegawai		
20	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	10
21	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	64
22	Terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	10
23	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan Barang Milik Daerah (BMD)	Dokumen	1
24	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	48

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.086.000	APBD-P
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.643.000	APBD-P
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.535.070	APBD-P
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.670.000	APBD-P
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	886.075.320	APBD-P
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.740.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		1.980.749.390	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

LUKMAN, S.Sos, M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 19720516 200801 1 016

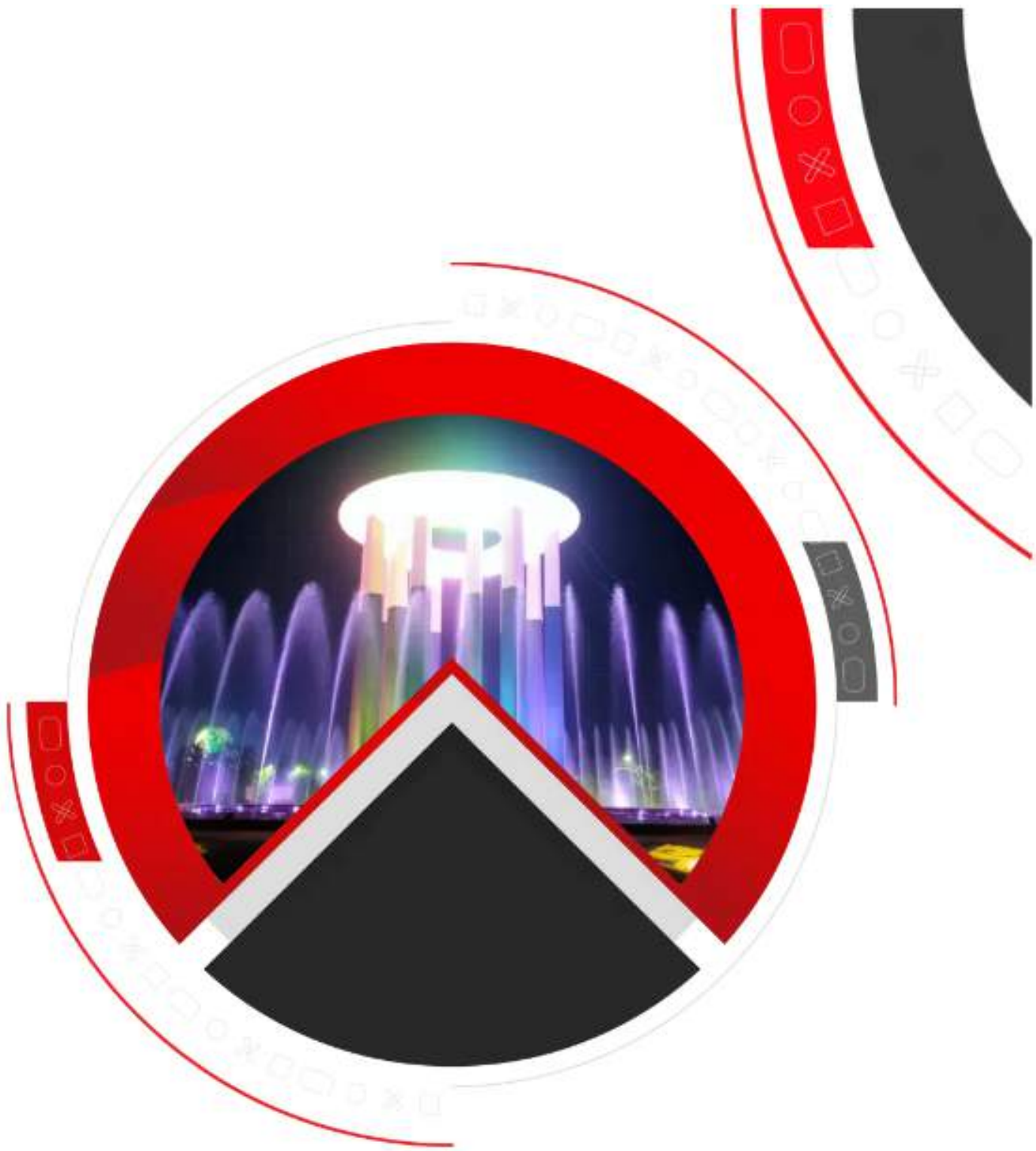
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

MARIANI, S.Sos

Penata Tk. I - III/d

NIP. 19710724 199303 2 004



BerAKHLAK²
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**